

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Pasar tradisional di Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural dan manajerial yang mengancam keberlanjutan fungsi utamanya, baik secara ekonomi maupun sosial. Permasalahan ini bermula dari tekanan eksternal, yaitu maraknya pasar ritel modern (supermarket dan minimarket) yang menciptakan persaingan sangat ketat. Pasar modern unggul dalam infrastruktur dan layanan, sehingga pasar tradisional kesulitan mempertahankan pelanggannya. Kondisi ini mendesak adanya kebijakan pemerintah yang secara tegas mendukung pasar tradisional, sebab persaingan ritel yang tidak terkendali dapat menyebabkan pasar tradisional punah dan memicu kemiskinan bagi para pekerja (Ferricha & Fauzan, 2020). Selain itu, keberhasilan jaringan rantai pasok pangan juga sangat bergantung pada interaksi yang kuat dalam Kemitraan Publik-Swasta-Masyarakat (Maryam et al., 2021).

Tantangan eksternal tersebut diperparah oleh berbagai masalah internal pasar, terutama yang terkait dengan kondisi fisik dan manajemen. Pasar tradisional umumnya memiliki infrastruktur yang buruk dan ketinggalan zaman, di mana revitalisasi menjadi masalah berkepanjangan di Indonesia. Selain itu, seringkali ditemukan masalah pengelolaan sampah yang tidak efisien yang seharusnya terintegrasi dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Noegroho et al., 2021). Oleh karena itu, kompleksitas masalah ini menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tidak cukup hanya mengandalkan administrasi *top-down* dan dimensi ekonomi, melainkan

harus menggunakan intervensi sosiologis yang fokus pada kolaborasi dan partisipasi komunitas.

Pernyataan ini berlandaskan pada pemahaman bahwa pasar tradisional merupakan salah satu ruang publik yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selain berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar adalah arena utama untuk interaksi sosial, pertukaran budaya, dan pembentukan hubungan antarwarga. Kajian sosiologi dan urban menegaskan bahwa pasar adalah ruang multidimensi yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekspresi identitas lokal. Dalam konteks Kota Batu, Pasar Among Tani tidak hanya dilihat sebagai pusat ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mendukung keberagaman interaksi.

Fungsi pasar melampaui transaksi dan ditekankan oleh studi-studi sosiologis sebagai:

1. Pasar sebagai Simpul Sosial: Pusat jaringan sosial (*social node*) yang mempertahankan dinamika komunitas dan berfungsi sebagai tempat sosialisasi (Vaivadaite & Navickienė, 2024)
2. Pasar sebagai Institusi Komersial yang Mengaktifkan Hubungan Sosial: Proses tawar-menawar secara khas turut mengaktifkan hubungan sosial antarindividu, melampaui transaksi ekonomi (Iskandar et al., 2018)
3. Pasar sebagai Arena Inklusi dan Mediasi: Ruang publik yang mendorong inklusi sosial dan berfungsi sebagai arena penting untuk menengahi perbedaan antar kelompok (Sophie, 2009).

4. Pasar sebagai Penghasil Nilai Sosial dan Emosional: Pelanggan didorong kembali oleh nilai emosional dan nilai sosial yang mereka rasakan, bukan hanya harga murah (Jae-Jang & Sun-Choung, 2020)
5. Pasar sebagai Pengakuan Praktik Kerja Pedagang (*Hidden Labour*): Pengelolaan harus mengakui kerja keras tersembunyi (*hidden labour*) pedagang—seperti kerja malam dan aktivitas fisik berat—yang merupakan elemen krusial yang membuat pasar berfungsi (Watson, 2025).

Masalah yang muncul di Pasar Among Tani seperti kios kosong dan menurunnya interaksi sosial—adalah kegagalan dalam mengoptimalkan dimensi sosial pasar. Oleh karena itu, penyelesaian masalah memerlukan intervensi sosiologis yang berfokus pada kolaborasi dan partisipasi komunitas melalui pendekatan *Local Social Governance* (LSG).

Guna mencapai tujuan tersebut, harus dipahami bahwa keberfungsian pasar tidak hanya bergantung pada kondisi fisiknya, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan ruang publik itu sendiri. Manajemen yang efektif menuntut koordinasi serangkaian intervensi, yang meliputi empat dimensi utama: koordinasi intervensi, pengaturan pemanfaatan dan konflik, rutinitas perawatan, serta investasi ruang publik (de Magalhães & Carmona, 2009). Ketika dimensi ini tidak berjalan optimal, fungsi pasar akan melemah, aktivitas sosial menurun, dan kualitas pengalaman masyarakat pun tergerus.

Padahal, pengelolaan yang baik ini sangat penting karena selain memiliki dimensi sosial yang kuat, pasar tradisional juga memegang potensi besar dalam mendukung regenerasi perkotaan. Kajian (Tajani et al., 2024) menunjukkan bahwa

pasar lingkungan dapat berperan sebagai generator regenerasi kota. Artinya, investasi terhadap pasar harus dilihat sebagai strategi pengembangan kawasan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Hal ini sangat relevan dengan Pasar Among Tani di Kota Batu, yang berpotensi menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi lokal, dan pengalaman wisata yang lebih optimal.

Faktanya, kondisi Pasar Among Tani saat ini belum mencerminkan potensi ideal tersebut. Hasil observasi dan wawancara awal mendukung fenomena buruknya fungsi ruang publik tersebut. Aktivitas pasar pada hari biasa tampak sepi, dan sejumlah kios kosong karena pedagang belum menyelesaikan administrasi. Ketidakterisian operasional ini menimbulkan kesenjangan pemanfaatan ruang dan menurunkan interaksi sosial. Selain itu, tumpukan sampah di beberapa sudut pasar mencerminkan bahwa rutinitas perawatan belum sepenuhnya efektif. Struktur dasar pengelolaan yang ada belum cukup menghidupkan pasar apabila tidak disertai tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan terkoordinasi secara konsisten.

Berbagai penelitian telah membahas pengelolaan pasar. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Studi terdahulu cenderung berfokus pada revitalisasi fisik atau aspek ekonomi saja. Penelitian mengenai mekanisme tata kelola partisipatif (Jaya et al., 2025) dan (Ogunnubi, 2022) belum secara operasional mengaitkannya dengan empat dimensi manajemen pasar yang krusial. Demikian pula, meskipun studi kualitas publik (Li et al., 2022) dan studi produksi sosial (Watson, 2025) dan (Fernando et al., 2021) menyoroti pengakuan terhadap *hidden labour*, studi-studi tersebut belum secara

terintegrasi menguji bagaimana tata kelola berbasis komunitas (*Local Social Governance*) memengaruhi kinerja pasar secara holistik.

Penelitian ini berfokus pada kerangka tata kelola sosial lokal (*local social governance*) sebagai solusi untuk mengisi kesenjangan tersebut. LSG penting karena menekankan kolaborasi multipihak, komunikasi yang deliberatif, dan kapasitas komunitas sebagai elemen utama untuk menciptakan stabilitas dan keberlanjutan sosial (Mahdinezhad & Sedghpour, Bahram Saleh Nabi, 2020). Selain itu, LSG mendorong partisipasi bermakna dan demokratisasi lembaga lokal, yang memberi ruang lebih besar kepada komunitas untuk mengelola fasilitas (*public-community management*) (Fernando et al., 2021). Secara operasional, LSG diwujudkan melalui perubahan fundamental dalam tata kelola yang menekankan kolaborasi dan konsensus, berdasarkan kerangka *Aksi Komunikatif*:

1. Fokus pada Subsistem dan Proses Sosial: Semua aktor memandang diri sebagai subsistem interdependen dalam sistem kolaboratif. Tata kelola harus dijalankan sebagai proses sosial melalui negosiasi dan koordinasi (Jaya et al., 2025)
2. Mewujudkan Komunikasi dan Penghargaan yang Setara: Pengelolaan didasarkan pada Aksi Komunikatif yang berorientasi pada konsensus dan bukan paksaan kekuasaan (Danardono & Cahyadi, 2009). Aksi ini mencakup pengakuan terhadap kerja harian tersembunyi (*hidden labour*) pedagang (Watson, 2025)
3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator Non-Dominator: Pemerintah harus membuka ruang lebih besar kepada komunitas untuk mengelola fasilitas (*public-community management*) (Fernando et al., 2021) dan melindungi dunia kehidupan

pedagang dari penetrasi berlebihan sistem ekonomi dan birokrasi (Jacobson, 2020).

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan (*research gap*) tersebut dengan menganalisis kontribusi *local social governance* (LSG) dalam mengoptimalkan fungsi Pasar Among Tani secara multidimensi. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami dinamika pengelolaan pasar secara empiris sekaligus mengonseptualisasikan model tata kelola yang lebih kolaboratif dan adaptif. Model ini diharapkan dapat menghasilkan kerangka kerja pengelolaan yang efektif dalam menyeimbangkan kebutuhan sosial dan nilai-nilai pedagang dengan tuntutan struktural manajemen pasar. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan kajian tata kelola ruang publik, dan kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pasar yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimana pengelolaan pasar berbasis *local social governance*?

## **1.3 TUJUAN MASALAH**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi pengelolaan berbasis *local social governance* terhadap optimalisasi fungsi pasar. Penelitian ini berfokus pada identifikasi bentuk praktik tata kelola yang melibatkan pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat, serta menilai sejauh mana kolaborasi tersebut mampu memperkuat fungsi sosial, budaya, interaksi, dan ekonomi Pasar Among Tani Kota Batu.

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

### 1. Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian mengenai *local social governance* dan manajemen ruang publik, khususnya dalam konteks pengelolaan pasar tradisional. Penelitian ini memperkaya literatur tentang bagaimana model tata kelola kolaboratif dapat memperkuat peran pasar sebagai ruang publik yang inklusif, dinamis, dan berkelanjutan.

### 2. Praktis

Di sisi lain, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi Pemerintah Kota Batu, pengelola Pasar Among Tani, dan para pemangku kepentingan. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pasar agar lebih efektif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu memperbaiki tata kelola ruang, kebersihan, pelayanan, serta interaksi sosial sehingga Pasar Among Tani dapat berfungsi optimal sebagai ruang publik yang hidup dan mendukung aktivitas ekonomi lokal.

## 1.5 DEFINISI KONSEP

### 1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional didefinisikan sebagai institusi komersial yang berfungsi sebagai lokasi primer bagi pertemuan pedagang dan pembeli untuk melaksanakan aktivitas jual beli, di mana mekanisme tawar-menawar harga secara khas terjadi. Proses penawaran dan permintaan ini turut mengaktifkan hubungan sosial antarindividu (Iskandar et al., 2018) menegaskan bahwa pasar adalah entitas yang

lebih dari sekadar transaksi ekonomi. Pasar tradisional memiliki karakteristik utama sebagai pusat perdagangan berbagai bahan pangan, yang diproduksi oleh petani desa (Iskandar et al., 2018). Secara sistemik, pasar merupakan bagian integral dari sistem pangan pedesaan-perkotaan, menyediakan pangan yang terjangkau, menciptakan titik masuk pasar bagi petani kecil, serta menyediakan lapangan kerja penting (Davies et al., 2022). Oleh karena itu, pasar memiliki fungsi yang melampaui dimensi ekonomi; ia merupakan ruang multidimensi dan simpul sosial (social node) yang vital. Secara sosiologis, pasar adalah arena interaksi sosial, pertukaran ide, persahabatan, bahkan wacana politik (Wibawa et al., 2024) serta berkedudukan penting sebagai faktor pendukung konservasi keanekaragaman hayati (Iskandar et al., 2018). Dengan demikian, pasar tradisional berkedudukan sebagai Ruang Publik yang mendukung inklusi dan memfasilitasi pembangunan hubungan sosial komunitas.

Pengelolaan pasar tradisional merangkum berbagai dimensi strategis yang diarahkan untuk mengontrol daya saing serta menjamin keberlanjutan fungsi pasar. Manajer pasar memiliki peran esensial dalam manajemen pasar yang baik (Utari et al., 2021). Namun, banyak pasar menghadapi tantangan struktural berkelanjutan, seperti defisit infrastruktur, pengelolaan sampah yang buruk, dan konflik internal yang dapat melemahkan efektivitasnya (Davies et al., 2022) (Sunarto et al., 2020). Faktanya, pengelolaan pasar di Indonesia saat ini menghadapi isu lingkungan yang signifikan akibat aktivitas campuran di pasar (Sunarto et al., 2020). Oleh sebab itu, efektivitas peran pasar sangat bergantung pada struktur tata kelola yang ada (Davies et al., 2022). Tata kelola yang baik harus mencakup aspek lingkungan seperti

pengurangan timbulan sampah melalui operasional rumah kompos dan penyediaan ruang terbuka hijau untuk memitigasi *Urban Heat Island* (Sunarto et al., 2020) serta strategi bisnis untuk bersaing dengan pasar modern (Utari et al., 2021). Pada akhirnya, model pengelolaan yang bersifat partisipatif-demokratis, yang mengintegrasikan kearifan lokal (Wibawa et al., 2024) serta mencakup peran komite, keterlibatan pemerintah, dan protokol resolusi konflik (Davies et al., 2022). bertujuan memastikan pasar terus berfungsi optimal sebagai pusat ekonomi dan sosial yang responsif terhadap kebutuhan komunitas, dengan komitmen kuat terhadap keberlanjutan.

## **2. *Local Social Governance (LSG)***

Tata Kelola Sosial Lokal (LSG) merupakan konsep multifaset yang melampaui mekanisme administrasi birokratis semata. Tujuan kebijakan dari LSG adalah peningkatan penyediaan kesejahteraan sosial melalui kerja sama kelembagaan ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang bersinergi untuk menciptakan masyarakat yang mandiri (Goodman, 2025). Ia diartikan sebagai kerangka kerja yang melibatkan koordinasi dan kerja sama berbagai lembaga dengan tujuan fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong demokrasi politik (Goodman, 2025). Pemerintahan daerah merupakan syarat mutlak bagi pematangan demokrasi politik dan ekonomi karena ia mengikis sisa-sisa otoritarianisme dan memperluas demokrasi hingga ke akar rumput (Srivastava, 2024). Pilar utamanya adalah kontrol lokal dan desentralisasi, yang memberi otonomi lebih besar kepada otoritas tingkat kota, distrik, dan kabupaten dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, desentralisasi ini menjadi

krusial dalam membuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi spesifik lokal, sekaligus memastikan pemerintahan mandiri lokal berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi melalui keterlibatan langsung warga negara (Nimani, 2024)).

LSG yang efektif secara inheren menuntut partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang melibatkan warga dalam menilai kebutuhan mereka sendiri dan berpartisipasi dalam proyek-proyek lokal (Zakrzewska, 2017). Partisipasi rakyat selanjutnya mengarah pada munculnya budaya politik yang sehat, dinamis, dan berkelanjutan, menjadikan lembaga-lembaga jauh lebih akuntabel dan sah (Srivastava, 2024). Konsep ini menekankan pentingnya transparansi informasi pemerintah dan inklusi anggota dalam proses pengambilan keputusan (Zakrzewska, 2017). Oleh sebab itu, LSG tidak hanya berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi lokal tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan menjamin kemandirian fiskal (Nimani, 2024). Meskipun demikian, implementasi LSG menghadapi tantangan signifikan (Goodman, 2025), terutama dalam menyeimbangkan kecenderungan sentralis dan desentralisasi (Nimani, 2024), serta mengatasi hambatan kelembagaan dan keuangan. Pada intinya, LSG merupakan model tata kelola dinamis yang bertujuan untuk memperkuat kendali lokal dan mendorong perilaku demokratis, transparansi, dan akuntabilitas (Nimani, 2024), yang sangat relevan untuk diimplementasikan dalam pengelolaan pasar tradisional sebagai manifestasi dari aksi komunikatif (*communicative action*) Habermas.

### **3. Ruang Publik (Pasar sebagai Area Publik)**

Ruang publik didefinisikan sebagai area di lingkungan perkotaan yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa adanya batasan atau kebijakan yang bersifat eksklusif. Konsep ini mencakup hak akses, kebebasan, dan penggunaan oleh masyarakat umum. Ruang publik diakui sebagai sistem perkotaan yang relasional dan struktural yang menyediakan berbagai layanan sosial, ekologis, dan ekonomi yang berharga (Beja & Santos, 2019). Secara fungsional, ruang publik berperan penting sebagai tempat utama untuk interaksi sosial, sarana pembentukan opini publik, dan media penghubung antara masyarakat sipil dengan negara (Groote et al., 2006). Dalam konteks urbanisme, ruang publik dianggap sebagai elemen struktural yang esensial untuk mendukung kehidupan masyarakat kota secara keseluruhan, mempromosikan identitas suatu tempat, serta mendorong terciptanya kohesi sosial dan sosialisasi yang demokratis. Ruang ini juga secara langsung berkontribusi terhadap kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Rajaram & Jagadisan, 2021), dan dipandang sebagai tempat demokratis untuk sosialisasi, keramahtamahan, dan makna budaya (Beja & Santos, 2019). Konsep keberlanjutan pun menjadi sangat relevan di sini karena ia berorientasi pada lokalitas, menjadikan ruang publik sebagai penentu utama strategi pembangunan (Ursić et al., 2024).

Pasar memiliki peran sentral sebagai ruang publik yang unik dan multifungsional, menjadi pusat pertukaran sosial, ekonomi, dan budaya yang memfasilitasi interaksi sosial sehari-hari dan mendukung keragaman di antara

semua kalangan (Beja & Santos, 2019). Untuk sukses, ruang pasar membutuhkan keberagaman, aktivitas, dan keterkaitan lingkungan fisik (Rajaram & Jagadisan, 2021). Khususnya pasar hijau dianggap sebagai pendorong pengembangan perkotaan yang sentral bagi identitas kota, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan inklusi sosial (Ursić et al., 2024). Bahkan, praktik pasar *pop-up* dan keramahtamahan kosmopolitan di pasar modern efektif dalam mengaktifkan interaksi sosial dan mendukung transformasi perkotaan (Bookman, 2023). Meskipun demikian, pasar dihadapkan pada ancaman privatisasi dan komersialisasi (Groote et al., 2006), terutama ketika pasar beroperasi sebagai ruang bermerek yang fokus pada konsumsi (Bookman, 2023). Lebih lanjut, perkembangan yang tidak teratur dan kacau (Rajaram & Jagadisan, 2021) serta masalah keselamatan dan aksesibilitas (Lowton, 2026) menunjukkan perlunya intervensi. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan dukungan kelembagaan sangat krusial agar pasar berfungsi maksimal sebagai ruang publik yang mampu meningkatkan interaksi dan melawan eksklusi sosial (Groote et al., 2006); (Lowton, 2026).

## **1.6 METODOLOGI PENELITIAN**

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena kekuatannya dalam menggali makna, nilai, dan pengalaman sosial yang kompleks dari para aktor yang terlibat dalam tata kelola (*social governance*) ruang publik Pasar Induk Among Tani. Oleh karena itu melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat memahami fenomena secara mendalam, terutama praktik, konflik, dan interpretasi sosial yang membentuk dinamika ruang publik pasar.

### **1.6.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*). Menurut *Robert K. Yin*, studi kasus adalah strategi penelitian yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat "bagaimana (*how*)" atau "mengapa (*why*)" terkait fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2023).

Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara holistik peran *social governance* dalam penataan dan pengelolaan ruang publik pasar. Pendekatan ini sangat krusial karena berupaya mendeskripsikan dan menjelaskan suatu kasus tunggal (Pasar Induk Among Tani) melalui pengumpulan data yang ekstensif dari berbagai sumber bukti, guna menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai kompleksitas tata kelola ruang publik di pasar.

### **1.6.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pasar Induk Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena merepresentasikan kasus kontemporer ruang publik yang bertransformasi, di mana pasar memiliki peran ganda sebagai pusat perdagangan sekaligus area interaksi sosial dan potensi ruang terbuka bagi publik. Kesenjangan (*gap*) penelitian sebelumnya yang hanya memetakan potensi pasar (Sulistiyo et al., 2025) akan diisi oleh penelitian ini dengan fokus pada model pengelolaan (*social governance*) yang mengikat dimensi sosial dan kelembagaan guna memastikan fungsi pasar sebagai ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan.

#### 1.6.4 Teknik Penentuan Subyek

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni memilih subjek yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam tata kelola, penggunaan, dan dinamika ruang publik Pasar Induk Among Tani (Nuruddin et al., 2025). Subjek yang akan diambil pada penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Daftar Subyek dan Informan dalam Pengelolaan Pasar**

| No | Nama Subyek/<br>Informan                         | Instansi                      | Peran dalam Pengelolaan<br>Pasar   |
|----|--|-------------------------------|--|
| 1. | Bapak Antok<br>(Kabid)                           | Diskumperindag<br>Kota Batu   | Penentu kebijakan<br>strategis, regulasi, dan<br>pengawasan tingkat kota.            |
| 2. | Ibu Gadis (Kepala<br>UPT)                        | UPT Pasar Induk<br>Among Tani | Penanggung jawab<br>operasional harian dan<br>koordinator teknis<br>lapangan.        |
| 3. | Bapak Rinto (Ketua<br>Komunitas)                 | Komunitas Arek<br>Nom Pasar   | Penggerak ekonomi<br>kreatif pemuda dan<br>aspirator komunitas lokal.                |
| 4. | Bapak Sayid<br>(Satpam)                          | Tenaga<br>Outsourcing         | Pelaksana teknis<br>keamanan dan penertiban<br>area pasar secara<br>langsung.        |
| 5. | Ibu Siti Rodhiyah,<br>Bapak Joko, Bapak<br>Yusni | Pedagang                      | Pelaku ekonomi utama<br>dan subyek kebijakan<br>penataan pasar.                      |
| 6. | Pengunjung/Pembeli                               | Masyarakat                    | Pengguna fasilitas pasar<br>dan pemberi feedback<br>atas kualitas layanan<br>publik. |

|    |          |                                  |  |
|----|----------|----------------------------------|--|
| 7. | Mas Dafa | Media Ketik.com<br>(Jurnalistik) | Fasilitator penyebaran informasi dan pembentuk opini publik pasar.       |
| 8. | -        | Akademisi                        | Pemberi perspektif teoritis dan evaluasi objektif terhadap sistem pasar. |

*Sumber* : Data Primer Olahan Peneliti, 2026.

## 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai proses pengamatan dan pencatatan data melalui penggunaan seluruh indra tubuh (penglihatan, pendengaran, dll.) untuk memperoleh bukti empiris yang diperlukan. Data yang dihasilkan dari observasi mencakup berbagai aspek di lapangan, seperti kegiatan yang berlangsung, kejadian unik, kondisi fisik objek, dan suasana hati atau perasaan yang dirasakan oleh individu di lokasi penelitian (Nuruddin et al., 2025).

Dalam penelitian ini, observasi akan dilaksanakan di Pasar Induk Among Tani, Kota Batu. Tujuan utamanya adalah untuk secara langsung melihat dan merekam dinamika sosial-spasial, aktivitas, dan interaksi nyata antar aktor yang terlibat (*stakeholders*) di ruang publik pasar. Teknik ini menjadi penting untuk menangkap praktik *social governance* di lapangan, terutama dalam situasi dan kondisi sebagai berikut:

- a. Waktu: Observasi akan difokuskan pada jam-jam sibuk perdagangan dan jam-jam non-perdagangan (siang/sore) untuk melihat kontras penggunaan ruang publik oleh berbagai kelompok pengguna (pedagang, pembeli, pengguna ruang publik).

- b. Situasi: Fokus pengamatan adalah pada proses interaksi sosial, tata kelola kebersihan, pengaturan penggunaan ruang (seperti parkir dan lapak), serta manifestasi partisipasi masyarakat (pedagang dan pengunjung) dalam menjaga ketertiban ruang publik.
- c. Kondisi: Observasi diarahkan untuk menilai kondisi fisik pasar pasca-revitalisasi sebagai ruang publik (aksesibilitas, kenyamanan, ketersediaan fasilitas umum) dan suasana sosial-emosional yang terbentuk dari interaksi antar komunitas pasar

#### **b. Wawancara**

Wawancara dapat dimaknai sebagai percakapan terstruktur atau dialog antara peneliti (pewawancara) dengan subjek penelitian (narasumber) yang bertujuan utama untuk mengumpulkan informasi mendalam dan data penelitian (Nuruddin et al., 2025). Metode tatap muka ini sangat penting untuk mengkonfirmasi dan memperdalam temuan awal yang telah diperoleh melalui observasi lapangan, sehingga memungkinkan peneliti menggali perspektif, pendapat, dan pengalaman subjektif para aktor terkait yang tidak dapat diakses melalui pengamatan semata.

Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur dengan subjek yang telah ditentukan melalui *purposive sampling*, mencakup: Pemerintah Daerah (Dinas terkait), Pengelola Pasar, Perwakilan Paguyuban Pedagang, Perwakilan Komunitas Pengguna Ruang (e.g., seniman lokal/NGO), dan Tokoh Masyarakat/Akademisi Lokal. Wawancara bertujuan untuk mendalami

peran *social governance* di Pasar Induk Among Tani dengan fokus pada tiga hal utama:

1. Kebijakan dan Regulasi terkait pengelolaan dan penataan ruang publik pasar.
2. Mekanisme Kolaborasi dan Partisipasi antar-aktor dalam pengambilan keputusan dan pemeliharaan ruang.
3. Tantangan Dinamika Ruang Publik (misalnya konflik penggunaan ruang, inklusivitas, dan pengaruh komersialisasi).

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menelusuri catatan tertulis, arsip, atau benda non-verbal yang relevan dengan topik penelitian (Nuruddin et al., 2025). Sumber data ini bisa berupa dokumen formal (seperti buku, notulensi rapat, atau daftar agenda), maupun data non-tertulis (seperti rekaman, foto, atau artefak lain) yang berfungsi sebagai bukti pendukung. Metode ini esensial untuk mendapatkan data historis, kontekstual, dan formal yang memperkuat validitas temuan wawancara dan observasi.

Pada penelitian ini, dokumentasi akan dilaksanakan untuk mengumpulkan data-data resmi dan non-resmi terkait tata kelola (*social governance*) ruang publik di Pasar Induk Among Tani. Dokumen yang akan ditelusuri meliputi:

- a. Dokumen Kebijakan: Peraturan Daerah terkait tata ruang, kebijakan pengelolaan pasar, dan regulasi tentang pemanfaatan ruang publik.

- b. Dokumen Operasional: Laporan tahunan UPT Pasar, notulensi rapat koordinasi mengenai penataan pedagang/kebersihan, dan catatan kegiatan Paguyuban Pedagang.
- c. Dokumentasi Visual dan Arsip: Peta zonasi pasar, foto-foto penataan pasca-revitalisasi, dan arsip keluhan/aspirasi masyarakat terkait penggunaan ruang pasar. Data ini berfungsi sebagai basis untuk menganalisis kesesuaian antara kebijakan formal dengan praktik governance di lapangan.

### 1.6.6 Teknik Analisa Data

Metode analisis data dalam penelitian studi kasus kualitatif ini menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh (Yin, 2023), di mana analisis difokuskan pada pengujian teori yang bersifat analitis dan eksplanatif. Proses analisis data dilakukan secara berkelanjutan (*iteratif*), dimulai sejak pengumpulan data di lapangan hingga proses penulisan laporan akhir.

Robert K. Yin 2018, sebagaimana dikutip oleh (Nurdin & Hartati, 2019) merekomendasikan pencocokan pola (*pattern matching*) sebagai teknik analisis yang esensial dalam studi kasus. Teknik ini bertujuan untuk menguji kesesuaian antara pola data empiris yang ditemukan di lapangan dengan pola yang diprediksi atau pola yang sudah ada dalam kerangka teoretis, sehingga kesimpulan yang ditarik memiliki validitas internal yang kuat.

Adapun tahapan dan teknik analisis data utama yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pencocokan Pola (*Pattern Matching*)

Teknik ini merupakan inti dari analisis studi kasus yang digunakan untuk menguji hipotesis dan hubungan sebab-akibat dalam konteks *local social governance*

(LSG) di Pasar Among Tani. Proses *Pattern Matching* dilakukan dengan menjabarkan dua set pola dan membandingkan kecocokannya:

a. Pola Teoretis (Pola Prediksi)

Pola ini didasarkan pada kerangka konsep dan teori yang diajukan dalam tinjauan pustaka, yang memprediksi bahwa pengelolaan yang efektif harus mencakup aspek sosial dan manajemen. Pola teoretis ini terdiri dari dua variabel utama:

1. LSG yang Ideal : Tata kelola yang menekankan kolaborasi multipihak, komunikasi deliberatif, dan pengakuan terhadap *hidden labour* pedagang.
2. Manajemen Pasar yang Efektif : Kinerja pasar yang optimal didukung oleh empat dimensi utama (koordinasi intervensi, pengaturan pemanfaatan dan konflik, rutinitas perawatan, serta investasi ruang publik).

b. Pola Empiris (Pola Lapangan)

Pola ini berasal dari data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pasar Among Tani, mencakup temuan nyata mengenai:

1. Implementasi LSG: Praktik aktual kolaborasi dan partisipasi antara pengelola, pedagang, dan komunitas.
2. Kondisi Pasar: Data aktual mengenai efektivitas koordinasi intervensi, pengelolaan sampah (rutinitas perawatan), kasus kios kosong (pengaturan pemanfaatan), dan tingkat interaksi sosial-spasial di pasar.

2. Pembangunan Penjelasan (*Explanation Building*)

Pembangunan penjelasan berfungsi sebagai teknik pelengkap yang bertujuan untuk membangun serangkaian hubungan kausalitas secara logis dan naratif. Peneliti

menggunakan teknik ini untuk menjelaskan *mengapa* pola tertentu terbentuk dan *bagaimana* aspek LSG secara spesifik memengaruhi fungsi sosial-ekonomi Pasar Among Tani. Proses ini dilakukan secara bertahap dan iteratif, di mana penjelasan awal dibandingkan kembali dengan data lapangan untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat mengenai dinamika tata kelola pasar.

### 3. Analisis Deret Waktu (*Time-Series Analysis*)

Analisis deret waktu digunakan untuk menelusuri dinamika perubahan fenomena sosial dan manajerial di Pasar Among Tani dalam rentang waktu tertentu. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati kronologi transisi pengelolaan pasar, mulai dari kondisi sebelum revitalisasi hingga implementasi kebijakan berbasis *local social governance*. Penelusuran secara kronologis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren keberhasilan atau hambatan dalam pengelolaan pasar, sehingga perubahan interaksi sosial dan kualitas ruang publik dapat dipetakan secara sistematis sesuai dengan urutan waktu kejadiannya.

#### **1.6.7 Teknik Validitas dan Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data dalam penelitian studi kasus ini dilakukan menggunakan kerangka (Yin, 2023) untuk menjamin kualitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Kerangka ini berfokus pada kriteria Validitas Konstruk (*Construct Validity*) dan Keandalan (*Reliability*).

##### 1. Validitas Konstruk (*Construct Validity*)

Validitas konstruk adalah langkah esensial untuk memastikan bahwa konsep teoretis yang diteliti (LSG, *hidden labour*, inklusi sosial) diukur dengan bukti yang tepat. Taktik utama yang digunakan untuk meningkatkan validitas konstruk dalam penelitian ini adalah:

a. Triangulasi Sumber Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber guna menjamin objektivitas temuan lapangan. Peneliti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui tiga sudut pandang aktor yang berbeda dalam kerangka *Hexahelix*. Data yang diperoleh dari pihak pengelola (UPT Pasar) mengenai kebijakan digitalisasi dan regulasi, dikonfrontasikan dengan pernyataan subjektif dari para pedagang selaku aktor ekonomi terdampak. Informasi dari kedua belah pihak tersebut kemudian divalidasi lebih lanjut melalui perspektif media massa sebagai instrumen kontrol sosial yang memiliki catatan amatan objektif terhadap dinamika Pasar Among Tani. Prosedur ini dilakukan untuk meminimalisir bias informasi dan memastikan bahwa simpulan penelitian didasarkan pada verifikasi data yang lintas sektoral LSG didukung oleh pandangan yang konsisten dari berbagai pihak.

b. Rantai Bukti (*Chain of Evidence*)

Peneliti juga menerapkan taktik rantai bukti untuk memastikan setiap kesimpulan dapat ditelusuri kembali secara logis dan transparan ke sumber data mentahnya (transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen arsip), sehingga memperkuat validitas temuan secara prosedural.

2. Keandalan (*Reliability*)

Keandalan dipastikan melalui penggunaan Protokol Studi Kasus yang terdokumentasi, yang memuat prosedur pengumpulan data, daftar pertanyaan wawancara untuk setiap informan kunci, dan format pencatatan observasi yang baku. Dokumentasi prosedur ini berfungsi sebagai jaminan keandalan metodologis.